

Daftar Pustaka

- Abdul Rauf, Alauddin Said. 2015. “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945.” *Flat Justisia Jurnal Ilmu hukum* 9:577–602.
- Aini, Riza Noor. 2016. “Analisis Kecenderungan Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bantul).” Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Bappenas. 2009. “Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor.” Bappenas.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design*. 4 ed. SAGE.
- Danayanti, Mauli. 2014. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Realisasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.” Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Direktorat Jenderal Anggaran. 2013. “Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia.” Kementerian Keuangan RI.
- Direktur Jenderal Perbendaharaan. 7 September. “Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.” Kementerian Keuangan RI.
- Dirjen Perbendaharaan. 11 April. “Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.” Kementerian Keuangan RI.
- . 23 Agustus. “Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017 Tentang Perubahan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.” Kementerian Keuangan RI.
- Dirjen Perimbangan Keuangan. 26 November. “Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Provinsi DIY.” Kementerian Keuangan RI.
- . 13 April. “Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2017 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan

Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2018.” Kementerian Keuangan RI.

Gubernur D.I. Yogyakarta. 24 Agustus. “surat Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 908/14521 Hal DAK Fisik 2017.”

Harahap, Riva Umar. 2011. “Pengaruh Dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kab./Kota Provinsi Sumatera Utara.” *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* Volume 11 No.1 (Maret).

Hennink, Monique, Inge Hutter, dan Ajay Bailey. 2011. *Qualitative Research Methods*. SAGE Publications.

Indonesia, Republik. 4 April. “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.” Menteri Keuangan Republik Indonesia.

———. 9 Desember. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.” Presiden Republik Indonesia.

———. 30 Desember. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.” Presiden Republik Indonesia.

———. 21 Agustus. “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.” Presiden Republik Indonesia.

———. 15 Oktober. “Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.” Presiden Republik Indonesia.

———. 2002. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Sekretariat Jenderal MPR RI.

———. 2016. “Buletin Teknis Nomor 21 Tentang Akuntansi Berbasis Akrual.” KSAP.

Kaharuddin. 2011. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Belanja Daerah di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus: Belanja Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan. 2010).” Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. 6 September. “surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Yogyakarta Nomor 900/4258 Hal Permohonan Penghentian Penyaluran DAK Fisik Reguer Bid. Kesehatan Triwulan II T.A. 2017.”

Kepala KPPN Yogyakarta. 29 Januari. “Laporan Keuangan Tingkat UAKPA-BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.”

———. 2017. “Laporan Pemantauan dan Evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.” KPPN Yogyakarta.

KPPN Yogyakarta. 2017a. “Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Umum Negara DAK Fisik.” KPPN Yogyakarta.

———. 2017b. “Data Kontrak DAK Fisik.” KPPN Yogyakarta.

———. 2017c. “Laporan Realisasi Penyaluran DAK Fisik Per Bidang dan Per Pemerintah Daerah.” KPPN Yogyakarta.

———. 2017d. “Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik.” KPPN Yogyakarta.

———. 2017e. “Notulen hasil Focus Group Discussion (FGD) DAK Fisik.” KPPN Yogyakarta.

Kurni, Aser. 2012. “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dua Puluh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Periode 2006-2010.” Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Kuswoyo, Iwan Dwi. 2011. “Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun.” Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Menteri Keuangan RI. 30 Desember. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.” Kementerian Keuangan RI.

———. 2012. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.” Kementerian Keuangan RI.

———. 2016. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 Tentang Klasifikasi Anggaran.” Kementerian Keuangan RI.

Presiden RI. 29 November. “Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.” Presiden RI.

———. 14 Januari. “Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.” Republik Indonesia.

———. 17 November. “Undang Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.” Republik Indonesia.

———. 28 April. “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.” Republik Indonesia.

———. 2010. “Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” Republik Indonesia.

———. 2016. “Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2017.” Presiden RI.

Putra, Putu Gde Mahendra, dan I Gusti Ketutu Agung Ulupui. 2015. “Pendapatan Asli Daerah. Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.” *Universitas Udayana*.

Santoso, Heri. 2016. “Analisis Hambatan Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2015 Satuan Kerja Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten.” Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Sukadi. 2012. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja pada Akhir Tahun Anggaran.” Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Usman, Syaikh, M. Sulthon Mawardi, Adri Poesoro, dan Asep Suryahadi. 2008. “Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).” *SMERU*, Januari.

World Bank. 2004. “Monitoring and Evaluation.” *World Bank*.